

DAFTAR PUSTAKA

Vince Lombardi

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2018. Pedoman Penyusunan Skripsi, hal. 65-66
Tulungagung

R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan
Bina Aksara. 1984. Pendayagunaan Tanah, hlm. 2 Bandung

KBBI,2021

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R. 1992. KUHPerdata dengan Tambahan UUPA dan UUP,
hlm 462 , Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang *Pokok*
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta,2008, hlm. 24

Pasal 11 Undang-Undang Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 12 Undang-Undang Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta, 1957, hlm. 1

<https://litigasi.co.id/hukum-perdata/20/kontrak-menurut-ahli>,

Sutarno. 2008. Aspek-aspek Hukum Perikatan, Sinar Grafika hlm 124, Jakarta.

R.Gumanti,(2012) Syarat Sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPerdata), Jurnal Pelangi
Ilmu, hlm. 5(1)

Salim. 2008. Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Sinar Gafika,
hlm. 42-43, Jakarta.

Hilman Hadikusumo. 1994. Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, hlm. 102, Bandung.

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, Ibid , hlm. 381

Idil Victor, *Permasalahan Pokok Dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Liberty Press, Malang, hlm. 24

<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 21 agustus 2023 pukul 09.00

Supriyadi. 2012. Hukum Agraria, Sinar Grafika hlm. 37, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Muwahid. 2016. Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Studi Keislaman.

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, KUH Perdata dengan Tambahan UUPA dan UUP, Jakarta: PT Pradnya Paramita,

Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004), hal 112.

Uthi' Chafidzah Nafsika. 2010. Tinjauan Hukum Agraria Nasional Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Tanah Kas di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, Skripsi, Surakarta.

Zumrotun Nisyak. 2010. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah, Skripsi, Yogyakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. Yogyakarta.